

**MUHASABAH UPAYA INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN  
SALAH SAJI MATERIAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SYAHRUL RAMADHANA**

**NIM : 90400114054**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Ramadhana

NIM : 90400114054

Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 24 Januari 1997

Jurusan/Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Per. Saumata Indah Blok D 8

Judul : *Muhasabah Upaya Internal Audit* dalam Pencegahan Slah Saji  
Material Atas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Kota  
Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2018

Penyusun,

**Syahrul Ramadhana**

**90400114054**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Muhasabah upaya *Internal Audit* dalam Pencegahan Salah Saji Material Atas Laporan Keuangan (Studi pada Inspektorat Kota Makassar)”**, yang disusun oleh **Syahrul Ramadhana**, NIM: 90400114054, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, bertepatan dengan 18 Rabi’ul-Awwal 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, Desember 2018

..... 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(  )
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(  )
Penguji I	: Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si.	(  )
Penguji II	: Dr. Syaharuddin, M.Si.	(  )
Pembimbing I	: Mustakim Muchlis, S.E., M.Si., Ak.	(  )
Pembimbing II	: Puspita H. Anwar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.	(  )

Diketahui Oleh :



**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**  
NIP. 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul ***“Muhasabah Upaya Internal Control dalam Pencegahan Salah Saji Material Atas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)”***.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi terakhir sejuta umat, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat sampai kepada para pengikutnya yang senantiasa tetap istiqamah sampai akhir zaman. Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta ayahanda Lukman dan Ibunda Hj. Suhartini yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepuh hati, selalu berbagi ilmu, memberikan motivasi semangat, dan memberikan titik terang dari setiap kesulitan yang dihadapi oleh penulis serta kepada para pembimbing Bapak Mustakim Muchlis, SE., M. Si., Ak dan Ibu Puspita Hardianti Anwar., SE., M. Si., Ak., CA., CPAI yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta dengan sabarnya memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah mereka berikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta wakil rektor I, II, III, IV
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak wakil dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Jamaluddin, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si, Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selama ini dengan segala jerih payahnya telah memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama menjalani masa studi.
8. Seluruh teman seperjuangan keluarga besar jurusan Akuntansi, terkhusus Akuntansi B angkatan 2014 yang selalu saling memberikan dukungan.
9. Untuk keluarga besar Kandang Seni Tirai Bambu Akuntansi (KSTB AK) yang selalu memberikan dukungan dan sebagai tempat mendapatkan inspirasi.
10. Serta keluarga kecil BMT As\_Salam.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin

***Wabillahi Taufik Wal Hidayah***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Gowa, Oktober 2018

Penulis,

**Syahrul Ramadhana**

**90400114054**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II      TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Teori Atribusi .....	12
B. <i>Internal Audit</i> .....	14
C. Pengendalian Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.....	19
D. Salah Saji Material .....	25

E. Rerangka Pikir .....	28
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	35
G. Pengujian Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar .....	38
2. Visi Misi.....	39
3. Susunan Organisasi Inspektorat .....	39
B. Hasil dan Pembahasan .....	48
1. Peran <i>Internal Audit</i> dalam Mencegah Salah Saji	
Material .....	48
2. Perilaku Auditor Internal dalam Mencegah Salah Saji	
Material berdasarkan Persepektif Islam .....	56



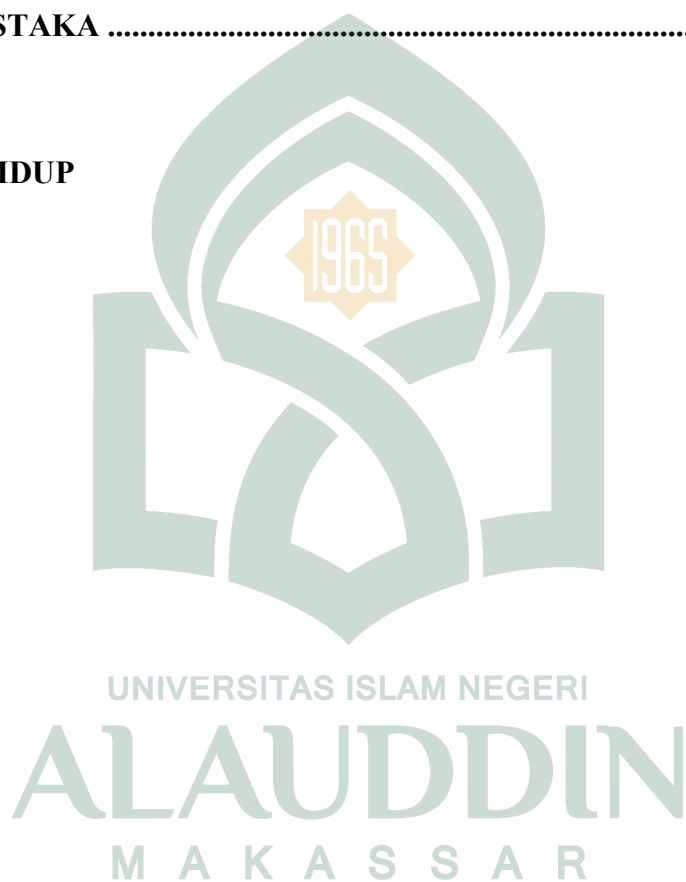
#### **BAB IV    PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian .....	65
C. Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67-69</b>
-----------------------------	--------------

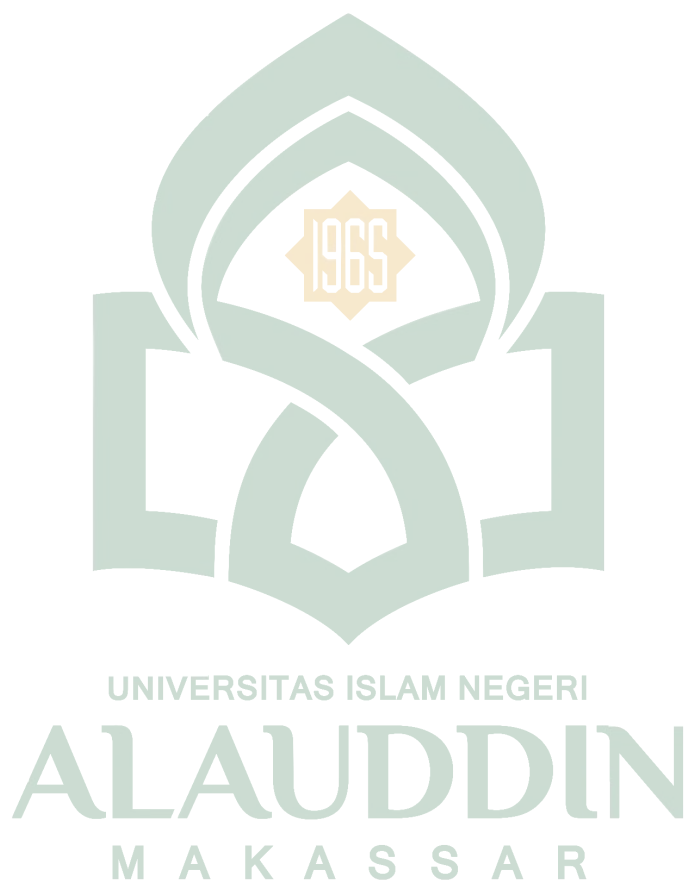
#### **LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	45
Tabel 4.2 Daftar Informan Penelitian .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar.....	44



## ABSTRAK

**Nama** : Syahrul Ramadhana  
**Nim** : 90400114054  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Judul Skripsi** : *Muhasabah Upaya Internal Audit dalam Pencegahan Salah Saji Material Atas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)*

---

Masih sering terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Namun fakta tersebut tidak berlaku untuk beberapa daerah contohnya kota Makassar, hal ini dibuktikan dengan presetasinya mendapatkan penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut sebanyak tiga kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *internal audit* dalam mencegah salah saji material. Kemudian untuk mengetahui perilaku auditor internal dalam mencegah salah saji material berdasarkan perspektif Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat kota Makassar, yang menjadi objek penelitian adalah auditor Inspektorat Kota Makassar. Informan dalam penelitian ini ada dua orang, yaitu auditor madya di Inspektorat pemerintah Kota Makassar.

Hasil dari penelitian ini adalah *internal audit* melakukan pengendalian internal yang baik dan pembinaan serta pengawasan kepada instansi yang diaudit. Selain itu juga melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Sementara upaya yang dilakukan auditor internal yaitu dengan cara bermuhasabah atau mengevaluasi diri dan juga meneladani 4 sifat Rasulullah yaitu shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana.

**Kata kunci** : *Muhasabah, Internal Audit, Salah Saji Material.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Keuangan daerah tidak luput dari imbas sistem reformasi yang terjadi di Indonesia khususnya instansi pemerintah, reformasi sudah mulai dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum seperti peraturan-peraturan mengenai daerah otonom, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* kepada instansi pemerintah. Mewujudkan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa dan negara (Ariyantini dkk, 2014).

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat (Adi dkk, 2016). Mengingat pentingnya suatu laporan keuangan, maka laporan keuangan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

Meskipun kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan (Artini dkk, 2014). Tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi, berupa penghilangan jumlah nominal dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap perilaku kecurangan padahal laporan keuangan merupakan sumber informasi penting dalam suatu instansi (Sari dkk, 2015).

Tindakan yang sering dilakukan dalam praktik kecurangan akuntansi yakni secara sengaja menggunakan sumber daya yang ada secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi (Artini dkk, 2014). Pada sektor publik kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk manipulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), manipulasi pajak, sehingga untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan.

Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan, kesalahan estimasi akuntansi yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau salah menafsirkan keadaan, dan kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah,

klasifikasi, cara penyajian. Kini pemerintah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangannya dalam lingkup otonomi daerah, akan tetapi kewenangan yang besar ini jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik tentu akan menimbulkan potensi kecurangan. Melalui pengawasan, maka diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Pujiswara dkk, 2014).

Sementara melihat fenomena yang ada, dilansir dari *Tribun Makassar.com* (2018) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak 2016 lalu, selama tiga tahun berturut-turut, Makassar tak pernah absen meraih predikat tertinggi di bidang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan itu ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD tahun 2017 dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Terdapat tiga aspek penting dalam mewujudkan *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Afni dkk, 2012). Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan adalah kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka jelas diperlukan pengendalian internal yang baik. Model pelindung pengendalian internal terdiri atas tiga tingkat pengendalian yaitu pengendalian pencegahan, pengendalian pemeriksaan, dan pengendalian perbaikan (Hall, 2009: 182). Tuanakotta (2015: 93) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Salah satu yang menjalankan pengendalian internal itu yakni internal audit, audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi yang menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi (Festidkk, 2014).

Sedangkan pengertian dari auditor internal itu sendiri adalah pegawai dari organisasi yang diaudit atau auditor yang bekerja dalam suatu instansi yang mempunyai tugas menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi telah dipatuhi (Erfiansyah dan Kurnia, 2018). Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor



internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

Salah satu bentuk internal audit dalam pemerintahan adalah Inspektorat. Inspektorat daerah adalah salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Afni dkk, 2012). Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, inspektorat kabupaten melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh SKPD yang ada pada setiap kabupaten sehingga dengan adanya pemeriksaan tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, sehingga kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa berkurang (Sari, 2016). Adanya kinerja yang baik dalam bidang pengawasan maka kualitas hasil pemeriksaan juga meningkat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat SKPD dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tuntutan masyarakat yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung jawab auditor pemerintah. Oleh karena itu, dengan melihat hasil kinerja dari pemerintah kota

Makassar yang mendapatkan 3 kali berturut-turut penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari *internal audit* pemerintah kota makassar berjalan dengan baik, dapat membuat instansi aman dari korupsi, laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan dan tidak terdapat salah saji material. Sehingga dengan adanya hal ini bisa dijadikan motivasi untuk inspektorat kota lain untuk kinerja yang lebih baik.

Disisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan bagaimana cara agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhana Wa ta'ala, bagaimana kita menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu melakukan evaluasi diri. Konsep Amar makruf Nahi Munkar dijelaskan dalam Q.S al-Imran/ 3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

*“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. al-Imran/ 3: 104)*

Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan berakibat negatif untuk kehidupan manusia.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu cara *internal audit* dalam pencegahan salah saji material atas laporan keuangan dan bagaimana perilaku auditor internal dalam mencegah salah saji material berdasarkan perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana upaya *internal audit* dalam pencegahan salah saji material atas laporan keuangan pada Inspektorat kota Makassar dan perilaku auditor internal dalam mencegah salah saji material berlandaskan nilai-nilai Islami. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa *internal audit* menjadi hal yang vital terhadap pencegahan atas salah saji material akuntansi. Apabila pengelolaan keuangan daerah telah sesuai yang diharapkan maka pemerintahan yang baik akan dapat tercapai. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara *internal audit* mencegah salah saji material ?
2. Bagaimana bentuk muhasabah auditor internal dalam mencegah salah saji material ?

## **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah sebagai berikut:

No	Nama Paneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Doddy Setiawan dan Murya Arief Basuki (2018)	Peran Auditor Intern Pemerintah, Motivasi, dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
2	Ruhbaniah, Agusdin dan Alamsyah (2017)	Determinan Kinerja Auditor Internal pada Inspektorat Se- Pulau Lombok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur audit, pengalaman dan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor internal.
3	Moh. Risqi Kurnia Adi, Komala Ardiyani, dan Arum Ardianingsih (2016)	Analisis Faktor- Faktor Penentu Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan).	Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum, Efektifitas pengendalian internal, Kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan ( <i>fraud</i> ) disektor pemerintahan. Tetapi pada variabel asimetri informasi dan Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan ( <i>fraud</i> ) di sektor pemerintahan.
4	Frisusmita Sari	Pengaruh Pembinaan	Hasil penelitian ini menunjukkan

	(2016)	dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu.	bahwa pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu.
5	Rita Yuliana (2013)	Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil.	Hasil penelitian menemukan bahwa muhasabah merupakan titik acuan untuk melakukan introspeksi bagi bank syariah supaya kembali kepada khittah (jalan perjuangan). Bank syariah harus diingatkan bahwa prinsip bagi hasil adalah penting dan tidak boleh diabaikan karena prinsip tersebut yang menjadi dasar operasional.
6	Pujianik Mulyani, dan Rindah F. Suryawati (2011)	Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No. 60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.	Penelitian ini mendukung teori bahwa SPI mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi. Peran dan fungsi SPI terhadap salah saji pencatatan akuntansi adalah adanya sinergi antara unsur-unsur dalam SPI yang meliputi: terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi,

			serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
--	--	--	--

### ***E. Tujuan Penelitian***

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cara *internal audit* mencegah salah saji material.
2. Untuk mengetahui bentuk muhasabah perilaku auditor internal dalam mencegah salah saji material.

### ***F. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini menggunakan teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam Mindarti (2016) yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha yang dilakukannya. Kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang. Penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan motivasi. Sedangkan penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang memengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial dan pandangan masyarakat.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi dunia akademisi (khususnya dalam bidang pendidikan akuntansi) dalam mendidik dan mendiskusikan mengenai pentingnya peran *internal audit* dalam mencegah salah saji material atas laporan keuangan serta memberikan masukan dan motivasi

bagi sebagian bahan evaluasi bagi pemerintah kota Makassar dan pemerintah kota yang lainnya.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Teori Atribusi*

Menurut Fritz Heider (1958) pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010: 90).

Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi mencoba menentukan penyebab perilaku seseorang berdasarkan tiga peran perilaku. 1) Perbedaan, mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. 2) Konsensus, mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada saat yang sama. 3) Konsistensi, melihat bagaimana seorang konsisten pada satu tindakan yang diulangi sepanjang waktu (Lubis, 2010: 91).

Menurut asumsi para ahli teori atribusi yang merupakan ciri dari teori atribusi menjelaskan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk



mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka berada. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebabmesk perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang kurang baik. Dengan demikian atribusi diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada dasarnya teori atribusi mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya menentukan perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu yang berasal dari dalam diri seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab diluar diri individu, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku apa yang diinginkan orang lain.

Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi

terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja dan tugas audit yang diemban merupakan dorongan eksternal yang diterima oleh auditor.

### **B. *Internal Audit***

Audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi yang menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi (Festi dkk, 2014). Sementara auditor internal itu sendiri adalah pegawai dari organisasi yang diaudit atau auditor yang bekerja dalam suatu instansi yang mempunyai tugas menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi telah dipatuhi (Erfiansyah dan Kurnia, 2018). Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa.

Adapun Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016, Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara

efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan audit internal adalah menyediakan informasi dan memberikan pelayanan kepada organisasi agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara efektif. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Oleh karena itu, auditor internal pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya agar terciptanya perwujudan tanggung jawab yang baik serta kualitas hasil kerja yang baik pula. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Pujiswara dkk, 2014). Fungsi audit internal adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari sistem pengawasan intern dan memberikan saran perbaikan bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun untuk mencapai tujuan struktur pengendalian intern yang efektif, maka harus didukung oleh semua komponen struktur pengendalian intern, yang menurut COSO terdiri dari lima komponen yaitu:

1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian yang menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. Setiap instansi harus memahami tingkat kekuatan lingkungan pengendalian internalnya. Lingkungan pengendalian adalah suatu kondisi dalam organisasi yang memiliki pengaruh terhadap pengendalian dan kesadaran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan komponen dasar dari semua komponen struktur pengendalian internal lainnya. Hal ini menyangkut sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, manajer, pemilik perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan perusahaan terhadap pencapaian tujuan instansi. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tujuh sub komponen yang terdiri dari.

## 2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko)

Penilaian risiko yaitu identifikasi, analisis pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Semua perusahaan memiliki ukuran, struktur, jenis industri, dan setiap perusahaan memiliki risiko internal dan eksternal. Risiko merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan. Jika memungkinkan pimpinan organisasi dilibatkan secara langsung dalam penilaian risiko. Pengkondisian awal untuk penilaian risiko memberikan kontribusi dalam penentuan tujuan organisasi yang dapat dicapai. Penilaian risiko dalam struktur pengendalian intern terdiri dari a) Mengidentifikasi dan menganalisis risiko relevan yang mungkin menghambat

pencapaian tujuan organisasi, b). Menyusun rencana untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang dihadapi.

### 3. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat menggunakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Sistem informasi yang baik adalah yang dapat membantu manajemen dalam menjamin bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Manfaat utama dari sistem informasi akuntansi yaitu membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan.

### 4. *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)

Aktivitas pengendalian yaitu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Setiap perusahaan harus membuat aktivitas pengendalian khusus berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, aktivitas pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko tertentu yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. Subkomponen dari komponen kegiatan pengendalian ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan proses informasi yang dibagi lagi menjadi pengendalian umum terhadap seluruh kegiatan organisasi dan pengendalian aplikasi yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi tertentu.

### 5. *Monitoring* (Pengawasan)

Pengawasan yaitu proses penilaian mutu kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu. Tujuan dari monitoring adalah untuk menilai kualitas dari sistem pengendalian intern setiap saat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. Contoh dari kegiatan monitoring yang terus menerus seperti mengawasi pegawai dalam kegiatan sehari-hari, dan kegiatan monitoring secara terpisah seperti kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara periodik. Kegiatan monitoring berkelanjutan dan secara terpisah dapat dilakukan oleh internal dan eksternal audit. Penilaian terhadap struktur pengendalian intern dan catatan akuntansi paling baik dilakukan oleh auditor.

Auditor internal adalah auditor yang ditetapkan oleh instansi yang berfungsi untuk menilai kegiatan dan menguji serta mengevaluasi efektivitas *internal control* secara independen dan mengusulkan alternatif-alternatif kegiatan yang efisien dan efektif. Auditor eksternal secara periodik melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara independen laporan keuangan perusahaan. Eksternal audit juga dapat memberikan informasi kepada manajer mengenai tingkat efektivitas *internal control* dan pendapatnya terhadap laporan keuangan organisasi.

Setiap instansi membutuhkan semua elemen struktur pengendalian internal sesuai dengan kondisi organisasi untuk menjamin berjalannya *internal control* dalam setiap kegiatan organisasi. Tinggi rendahnya tingkat penerapan masing-masing komponen sangat dipengaruhi oleh ukuran organisasi, kompleksitas perusahaan, jenis perusahaan, filosofi manajemen, serta budaya entitas.

### C. Pengendalian Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits

Disisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan bagaimana cara agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhana Wa ta'ala, bagaimana kita menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu melakukan evaluasi diri. Salah satunya yaitu konsep amar makruf nahi munkar juga dijelaskan dalam Q.S. al-Imran/ 3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

*“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S. al-Imran/ 3: 104).

Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan berakibat negatif untuk kehidupan manusia. Selain itu, kita juga bisa melihat Q.S al-Hasyr/ 59: 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Terjemahan:

*“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr/ 59: 18).*

Ayat diatas adalah ayat yang isinya perintah agar kita mau ‘evaluasi diri’, muhasabah diri atas apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Hal ini sangat penting karena tanpa ada muhasabah kita bisa terlena dan lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini yang begitu materialistis, hedonis dimana kepuasan, kesenangan dan keberhasilan hidup hanya diukur dari kaca mata materialistis.

Istilah yang sering diidentikkan atau memiliki kedekatan arti dengan korupsi antara lain ialah *Ghulul*. *Ghulul* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-haditsnya terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik (Suryanto dan Anip, 2016: 84). Definisi diatas menunjukkan bahwa ghulul terjadi pada penggelapan harta rampasan perang. Hal ini sejalan dengan makna Q.S Ali Imran: 161 dan sejumlah hadis tentang ghulul. Namun melihat beberapa hadis lainnya, ghulul juga terjadi pada kasus pegawai/pejabat yang mengambil sesuatu di luar haknya yang diatur secara resmi. Pejabat yang menerima hadiah dari pihak tertentu terkait dengan tugasnya, dan orang yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya.

Melihat unsur-unsur yang melingkupinya, cakupan makna ghulul bisa diperluas, dikembangkan hingga ke istilah korupsi dalam berbagai bentuknya



yang kini semakin canggih modus operasinya dan menjadi duri dalam kehidupan masyarakat. Hadits-hadits tentang ghulul berikut dinilai mewakili kajian tematik tentang korupsi. Hadis pertama terdapat dalam shahih Bukhari, kitab Al Jihad Wa Al-Sair, Nomor 2845:

*Ali bin Abdullah telah menceritakan hadis kepada kami. Sufyan telah menceritakan kepada kami. Dari Umar, dari Salim bin Abi Al-Ja'di, dari Abdullah bin Umar berkata: bahwa pada rombongan Rasulullah saw. .. Ada seorang bernama Kirkirah yang mati di medan perang. Rasulullah saw. bersabda: "dia masuk neraka". Para sahabat pun bergegas pergi menyelidiki perbekalan perang. Mereka mendapatkan mantel yang ia korup dari harta rampasan perang. (H.R Bukhari).*

Beberapa tindakan berikut dapat dikategorikan sebagai ghulul, misalnya pejabat/ pegawai yang menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, pejabat pengadaan barang yang *me-mark up* (menggelembungkan) biaya pembelian dari yang seharusnya, pegawai parkir yang tidak menyerahkan seluruh pendapatan parkir kepada yang berwenang, petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima hadiah dari wajib pajak tersebut, pejabat yang tidak mengembalikan sarana dinas (kendaraan, rumah dan lain-lain) setelah tidak menjabat lagi. Hadiah bagi pejabat/pemegang kebijakan termasuk ghulul. Jika dalam menjalankan tugas atau jika terkait dengan tugasnya, seseorang yang memiliki jabatan atau mempunyai wewenang tertentu diberi hadiah oleh pihak lain dengan harapan pejabat tersebut dapat memberi kemudahan tertentu atau memberi keringanan tertentu atas suatu tuntutan, maka hadiah yang demikian dikategorikan sebagai ghulul (korupsi).

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia untuk menghindari korupsi sekecil apapun, karena itu akan mendatangkan laknat Allah. Laknat tersebut sudah bisa dirasakan dalam bentuk kegelisahan hidup di tengah gelimang harta hasil korupsi. Melihat realita kecurangan yang terjadi di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Nampaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis yang telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia (Suryanto dan Anip, 2016: 102). Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam.

1. Sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, *“Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”*. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini.

2. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, *“Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”*. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, *“Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak”* (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah berkata, *“Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap”* (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, *“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur”* (HR Imam Ahmad).
3. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat

kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

4. Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah sehingga ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.
5. Hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal

kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi.

6. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, *“Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”*. Dari sini terlihat dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Suryanto dan Anip, 2016: 107).

#### **D. Salah Saji Material**

Auditor memiliki tanggungjawab untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji yang material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Perbedaan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Kecurangan mengacu pada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan dengan tujuan tertentu sedangkan kekeliruan adalah tindakan yang tidak disengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar akuntansi (Mulyani dan Rindah, 2011).

Salah saji material yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk

kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen. Kecurangan dalam laporan keuangan seperti manipulasi catatan akuntansi/dokumen pendukung lainnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, representasi yang salah dalam atau menghilangkan dari laporan keuangan, salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset seringkali disebut dengan penyalahgunaan/penggelapan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aset, dll.

Ada beberapa faktor utama penyebab timbulnya kecurangan itu sendiri, yaitu adanya kerja sama dengan pihak ketiga, adanya kerja sama antara pegawai instansi, adanya *internal audit* yang kurang memadai yang dapat memiliki dampak yang material terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sehingga auditor eksternal tidak dapat memberikan pendapat “wajar tanpa pengecualian”. Penentuan apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada umumnya dilakukan melalui pengujian (*testing*) terhadap sejumlah sampel dan bukan pengujian terhadap keseluruhan populasi.

Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kecurangan sebagai suatu kesalahan,

dimana kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar (Mulia dkk, 2017).

Kesalahan pencatatan akuntansi bisa dikategorikan menjadi kelalaian dan kecurangan, dimana kelalaian mengacu pada salah perhitungan, salah estimasi dan salah interpretasi standar akuntansi, sedangkan kecurangan mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan cara membaca atau menyesatkan laporan keuangan (Mulyani dan Rindah, 2011). Kategori kecurangan ini didasarkan atas motivasi yang menguntungkan diri sendiri atau kepentingan kelompok. Pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara andal, aset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tindakan yang sering dilakukan dalam praktik kecurangan akuntansi adalah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindakan penyimpangan pada laporan keuangan sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan (Artini dkk, 2014). Kecurangan

akuntansi yakni salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja maupun tidak sengaja jumlah nominal atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### **E. Rerangka Pikir**

Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi penyimpangan (Adi dkk, 2016). Meskipun dengan melihat kejadian pada umumnya yang ada di dalam dunia sektor publik, terdapat berbagai tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan yang sering dilakukan dan merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi, berupa penghilangan jumlah nominal dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Namun fakta tersebut tidak berlaku untuk beberapa daerah contohnya kota Makassar, hal ini dibuktikan dengan presetasinya mendapatkan penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berturut-turut sebanyak tiga kali.

Hal ini menandakan bahwa *internal audit* pemerintah kota Makassar dalam hal ini Inspektorat bekerja sebaik mungkin dalam melakukan tugasnya



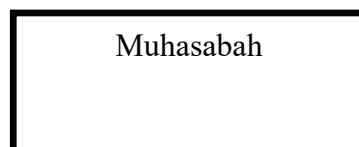
sehingga pengendalian internal berjalan dengan baik dan efisien. Pencegahan permasalahan kecurangan akuntansi perlu dirancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh *internal audit* pemerintah kota Makassar terbagi atas dua macam yaitu upaya yang dilakukan berdasarkan instansi dan berdasarkan individu. Bila melihat dari sisi instansi maka upaya yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar untuk mencegah terjadinya salah saji material cukup luas yakni dengan mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Selain itu juga dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada auditor agar meningkatkan kompetensinya.

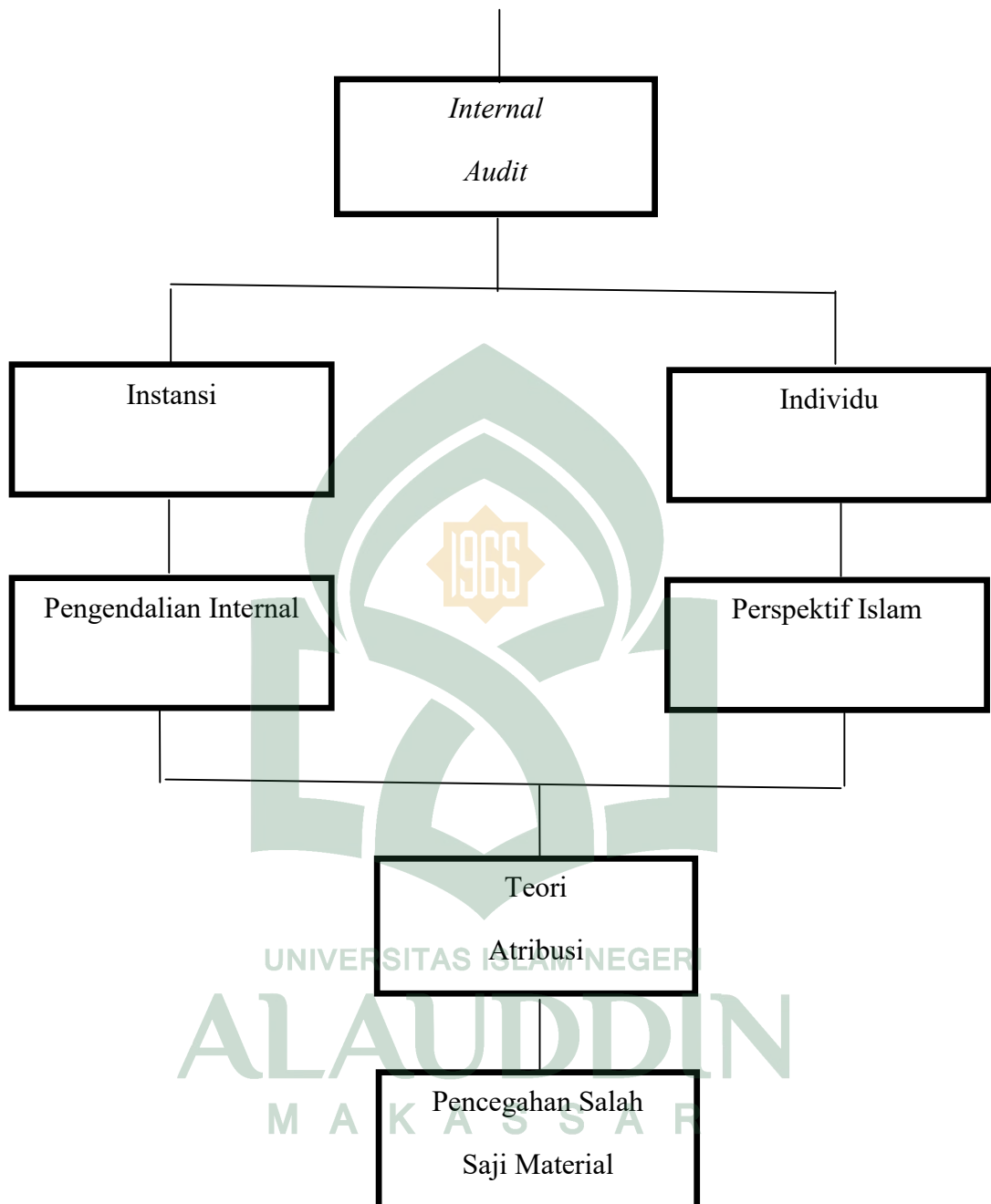
Dilihat dari sisi individu, upaya yang dilakukan sebagai auditor internal Inspektorat kota Makassar yakni dengan melakukan evaluasi diri terhadap kesalahan yang diperbuat sebelumnya baik itu sengaja maupun tidak. Sehingga hal inilah yang menjadikan muhasabah (evaluasi diri) penting untuk diaplikasikan manusia dalam menjalani kehidupan, dan dapat bercermin dari apa yang telah terlewatkan, melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kekhilafan yang pernah diperbuat, mengambil hikmah dan pelajaran darinya, serta mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk masa depan. Selain dapat mendorong orang untuk menyadari kekhilafannya, dapat pula memotivasi orang mendekatkan diri kepada Allah dan mendorong kearah hidup bermakna dalam dataran kesehatan mental, dan hidup yang bermanfaat.

Terlepas dari itu, apabila dikaitkandengan teori maka teori atribusi dirasa sesuai dengan tulisan ini dimana teori atribusi menggambarkan bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan yang kurang baik. Sehingga dengan adanya upaya *internal audit* yang baik dan didukung oleh upaya para individu yang terdapat dalam instansi tersebut maka melahirkan pencegahan salah saji material yang baik. Adapun gambar rerangka fikir secara sederhana sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Skema Rerangka Pikir**





### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2016: 8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada dua alasan yaitu, pertama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konstektual. kedua, pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan dengan fakta alaminya. Lokasi penelitian dilakukan pada Inspektorat Kota Makassar.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Nurhayati (2015) dengan fenomenologi penelitian di bidang akuntansi dapat merefleksikan pengalaman peneliti dalam melihat realitas sosial akuntansi, sejauh mana pengalaman tersebut secara intensif masih berhubungan dengan suatu

objek yang ditelitinya. Fenomenologi sendiri berusaha melihat struktur yang implisit menjadi implisit dan memaknai pengalaman seseorang. Metode ini ditujukan untuk menggambarkan elemen yang mendasar dalam fenomena untuk mengungkap esensi universal yang mendasari kesadaran manusia.

### ***C. Jenis dan Sumber Data Penelitian***

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti (Umar, 2014: 42). Peneliti dapat mengontrol data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Sementara data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh peneliti (Umar, 2014: 42). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsiparsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

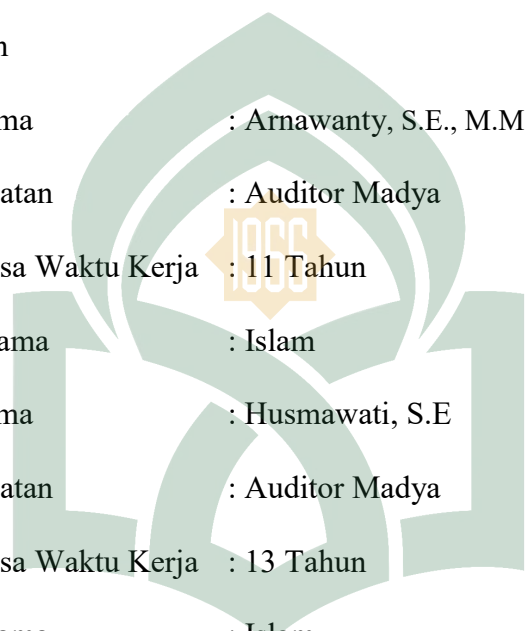
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan di kantor Inspektorat kota Makassar. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

#### Data informan

- 
- a. Nama : Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA
  - Jabatan : Auditor Madya
  - Masa Waktu Kerja : 11 Tahun
  - Agama : Islam
  - b. Nama : Husmawati, S.E
  - Jabatan : Auditor Madya
  - Masa Waktu Kerja : 13 Tahun
  - Agama : Islam

#### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

#### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

#### 4. *Internet Searching*

*Internet searching* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

#### **E. *Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang digunakan berupa alat penunjang yang dapat mengukur ataupun menggambarkan fenomena yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian perekam suara, kamera dan alat tulis.

#### **F. *Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Proses analisis data yang dilakukan adalah (1) mentranskripsikan rekaman hasil wawancara ke dalam tulisan; (2) *bracketing (epoche)* adalah membaca seluruh data (deskripsi) tanpa prakonsepsi; (3) tahap *horizontalization* adalah menginventarisasi pernyataan pernyataan penting yang relevan dengan topik; (4) tahap *cluster of meaning* adalah rincian pernyataan penting itu diformulasikan ke dalam makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu; (5) tahap deskripsi esensi adalah mengintegrasikan tema-tema ke dalam deskripsi naratif (Rahmawati, 2013).

### G. Pengujian Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi yaitu dengan triangulasi peneliti, metode, teori ataupun sumber data. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2007:270) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

#### 1. *Credibility* (Validitas Internal)

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah



dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan / benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. *Transferability*

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar**

Sesuai Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk memenuhi target RPJMN, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 di Inspektorat daerah Kota Makassar, melakukan Penilaian untuk Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3. Atas Penilaian ini Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3. Demikian pula dengan Maturitas SPIP, pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 di Inspektorat Daerah Kota Makassar, melalui *Reasessment* maka berdasarkan laporan nomor: LAP-804/PW21/3/2017 mendapatkan nilai “3, 226” atau “terdefinisi”.

Kantor Inspektorat Kota Makassar, adalah suatu badan instansi pemerintah yang berada di daerah Kota Makassar dan terletak di Perumahan Griya Fajar Mas

Jl. Teduh bersinar No. 7 Makassar. Inspektorat daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Inspektorat daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis *administrative* mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar telah memperoleh Sertifikat ISO 9001: 2008 dan yang terbaru adalah 9001:2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan *United Registrar of System*.

## **2. Visi dan Misi**

Visi inspektorat daerah Kota Makassar yaitu “*Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa Melalui Pengawasan yang Efektif dan Profesional*”. Untuk mewujudkan visi tersebut didukung dengan misi “*Terwujudnya Pengawasan Internal Pemerintah Kota Makassar yang Efektif*”.

## **3. Susunan Organisasi Inspektorat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota Makassar dan secara teknis *administrative* mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi jabatan pada kantor Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

**a. Inspektur**

Tugas dan fungsi inspektur pada pasal 7 yaitu;

- 1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan;
- c) pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
- d) penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan;
- f) pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga inspektorat;
- g) pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.

#### **b. Bagian Tata usaha**

Tugas dan Fungsi bagian Tata Usaha pada Pasal 8 adalah:

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;
  - b. menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional pengawasan;

menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- c. menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. melaksanakan administrasi jabatan fungsional.

#### **c. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua kelompok dengan tugas melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan daftar materi audit;
  - b. perumusan dan penyusunan program kerja audit;
  - c. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan audit;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Inspektur.

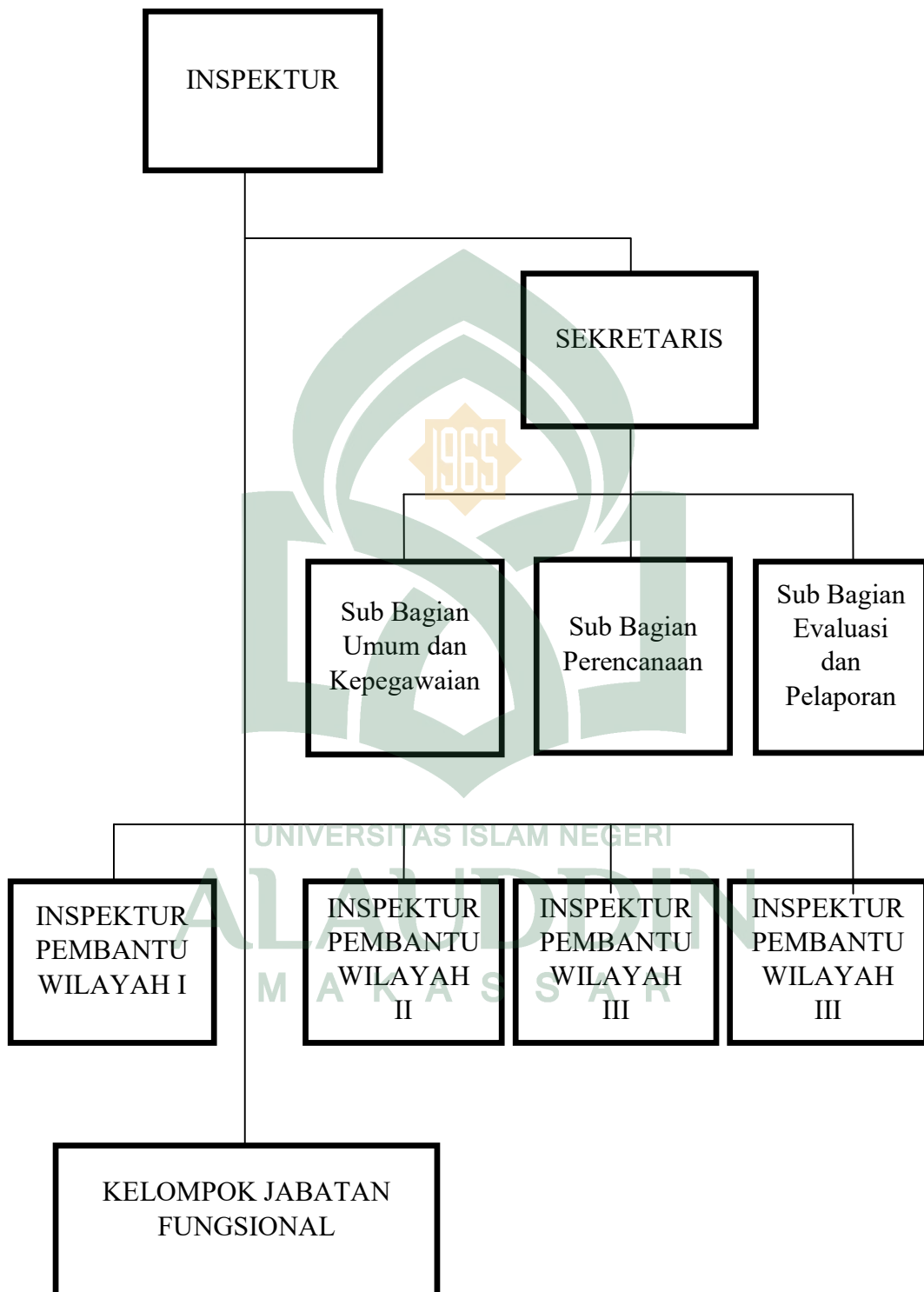
Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal (2) ditetapkan bahwa penempatan Pejabat Fungsional Auditor ke dalam kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Secara teknis, struktur organisasi inspektorat kota makassar digambarkan dalam struktur bagan sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar**



*Sumber: Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar (2017)*



#### d. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Inspektorat Daerah Kota Makassar sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Bazetig</b>
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Pejabat Fungsional Auditor	23
6.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	3
7.	Pejabat Fungsional Umum	26
8.	Pegawai Kontrak	23
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>

*Sumber: Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar (2017)*

#### e. Program Dan Kegiatan Tahun 2017

##### 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara Komprehensif pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- b) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar
- c) Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan
- d) Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan
- e) Pemutakhiran Data Temuan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar
- f) Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

- g) Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Hasil Temuan Aparat Pengawasan Internal
- h) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- i) Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Auditor
- j) Pemantauan dan Pemeriksaan Kegiatan Belanja Modal OPD Lingkup Kota Makassar
- k) Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada OPD Kota Makassar
- l) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
- m) Pemeriksaan Dana BOS
- n) Inventarisasi Wajib LP2P PNS
- o) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi
- p) Evaluasi LAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- q) Monitoring dan Evaluasi atas Pencatatan Aset Hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD dan non APBD
- r) Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- s) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal
- t) Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- u) Pemantauan Rencana Aksi Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- v) Evaluasi Berkara Temuan Hasil Pengawasan
- w) Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
- x) Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- y) Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
- z) Penyelesaian Hasil Temuan Ombudsman RI
- aa) Monitoring Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

**2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:**

- a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan
- b) *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO.

**Tabel 4.2**

**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Waktu Penelitian	Jabatan
1	Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA	15 Oktober 2018	Auditor Madya
2	Husmawati, S.E	15 Oktober 2018	Auditor Madya

**B. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

**1. Cara *Internal Audit* mencegah salah saji material**

Internal audit memiliki peran yang sangat krusial dalam pencegahan salah saji material. Apabila audit internal dalam suatu instansi berjalan dengan baik maka menandakan tingkat pengendalian internalnya juga berjalan baik sehingga bisa mencegah dari penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan.

Pengendalian internal adalah proses, kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Tuanakotta 2015: 351). Sebagaimana pengendalian internal adalah sebuah prosedur, maka prosedur tersebut dijalankan oleh sekelompok audit internal. Oleh karena itu, audit internal menjadi bagian yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pengendalian internal yang baik dan efektif di organisasi sektor publik (Novriani dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengendalian internal maka semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang dilakukan begitu pula sebaliknya.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Armawanty selaku auditor senior di inspektorat kota Makassar, secara tersirat mengungkapkan pentingnya pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya salah saji material.

“Masing-masing memang harus ada pengendalian internalnya yang secara khusus menangani semua masalah. Jadi semakin bagus dan baik pengendalian internal suatu instansi maka semakin kecil potensi kecurangan yang terjadi, dan kemungkinan salah saji pada laporan keuangan juga bisa terhindar.”

Saat dikonfirmasi, Ibu Husmawati selaku auditor senior di inspektorat Makassar menyatakan bahwa tanggungjawab auditor tidak hanya sebagai pemeriksa tetapi juga sekaligus melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi.

“Kita di sini selaku pemeriksa sekaligus mengayomi jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, yang material maupun tidak material maka harus dikembalikan untuk diperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi semakin bagus pengendalian internalnya ya jelas bisa mencegah salah saji maupun kecurangan.”

Melihat hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa *internal audit* memiliki peran yang vital terhadap pelaksanaan pengendalian internal yang baik sehingga dapat mencegah salah saji material atas laporan keuangan. Sebab pada dasarnya tugas audit internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Namun terlepas dari hal tersebut *internal audit* memiliki peran yang vital selaku unit kerja yang mengevaluasi pengendalian internal yang ada agar didesain dengan memadai dan dijalankan dengan baik dan efisien. Oleh karena itu, selain bertugas untuk melakukan pemeriksaan, auditor juga memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki kesalahan.

Mengenai kesalahan saji yang kemungkinan terjadinya bisa disebabkan oleh kecurangan atau *human error*, pihak inspektorat menanggapi bahwa selama ini tidak ditemukan adanya kesalahan saji yang material. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Arnawanty.

“Salah saji material yah, di sinilah perannya kita bagaimana SPI. Jadi ada namanya SPI dan dia berjenjang reviewnya sehingga dimungkinkan untuk tidak terjadi salah saji, karena saji itu akan sangat berpengaruh sekali dengan laporan keuangan. Namun selama ini, kalau di inspektorat dalam laporan keuangan yang kami periksa kayaknya belum ada kejadian salah saji meskipun tidak dipungkiri, bisa saja terjadi. Jadi bagaimana caranya untuk mencegah itu, kita membuat SOP agar pengndaliannya itu mencakup semua mulai dari pembukuannya, jurnalnya, buku besarnya apakah ini sudah cocok pos-posnya.”

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Husmawati yang menyatakan bahwa walaupun terdapat kesalahan, semuanya bersifat tidak material.

“Kalau di inspektorat dalam laporan keuangan selama ini kayaknya belum ada kejadian salah saji. Walaupun ada, sifatnya yang tidak material.”

Pengakuan oleh pihak inspektorat adalah pendukung atas kenyataan bahwa sejak tahun 2016, SKPD yang terlibat dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Makassar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini membuktikan bahwa Inspektorat Kota Makassar mengambil peran yang penting dalam perolehan opini tersebut. Sejalan dengan penelitian Pearson (2014) yang berargumen bahwa auditor internal pemerintah mempunyai peran yang vital dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas lembaga sektor publik.

Imbauan mengenai tugas dan tanggung jawab internal audit tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Inspektorat mengenai pencapaian gemilang tersebut, Pihak Inspektorat Makassar mengaku bahwa mereka telah melakukan upaya untuk mencegah kesalahan saji dengan menyesuaikan komponen yang termaktub dalam COSO. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arnawanty.

“Kami berpedoman pada komponen dalam COSO dalam melakukan pemeriksaan. Bagaimanapun juga, efektivitas dalam pemeriksaan itu tidak akan tercapai kalau salah satu saja komponennya tidak terlaksana dengan baik.”

Menurut COSO pengendalian internal sendiri memiliki beberapa komponen di dalamnya yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta

pengawasan. Ke lima komponen tersebut merupakan unsur yang membangun efektivitas suatu pengendalian internal.

Komponen dasar dalam COSO adalah lingkungan pengendalian. Membangun lingkungan pengendalian yang baik adalah faktor dasar yang cukup penting. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, serta menyediakan disiplin dan struktur. Hal ini menyangkut sikap dan kesadaran dari pimpinan perusahaan, komite audit, manajer, pemilik perusahaan dan para pekerja yang terlibat dalam kegiatan instansi untuk pencapaian tujuan instansi. Sejalan dengan hasil wawancara Ibu Arnawanty yang menyatakan bahwa:

“Kami di sini memiliki bagian-bagian dan dikepalai oleh inspektur. Dalam melaksanakan penugasan atau pemeriksaan itu, masing-masing memiliki penanggungjawabnya. Kemudian ada ketua tim dibawahnya ada anggota tim. Jadi reviewnya itu mulai dari hasil anggota kemudian direview oleh ketua tim dan selanjutnya direview lagi oleh wakil penanggungjawab atau pengendali teknis sehingga semuanya memiliki hubungan yang berkaitan.”

Ibu Husmawati turut mendukung pernyataan Ibu Arnawanty yang menyatakan bahwa

“Disini kami berjenjang tingkatannya dan dikepalai oleh inspektur, adapun dalam penugasan tetap hasil kerja anggota tidak serta merta diberikan kepada atasan tapi melalui ketua tim kemudian inspektur pembantu sehingga dalam melaksanakan tugas anggota bisa merasa sadar akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa semua tingkatan yang terlibat di dalam, mulai dari tingkatan atas ke bawah merupakan lingkungan pengendalian yang memiliki hubungan saling terkait satu sama lain. Review

dimulai dari hasil pemeriksaan dari tingkat terbawah ke tingkat teratas struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan pemeriksaan yang bertahap dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan seperti salah saji material ataupun kecurangan. Selain itu pemeriksaan secara bertingkat juga memungkinkan terciptanya komunikasi yang merata antar para auditor senior dan junior sehingga dapat meminimaisir adanya kesenjangan informasi.

Komponen kedua adalah penilaian resiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi, analisis pengelolaan resiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Resiko merupakan berbagai bentuk ancaman dan ketidakpastian yang dihadapi oleh instansi dalam pencapaian tujuan. Penilaian resiko dalam struktur pengendalian internal terdiri dari mengidentifikasi dan menganalisis resiko relevan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi, menyusun rencana untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Arnawanty dalam wawancaranya yang menyatakan:

“Kalau pada saat dilaksanakan pemeriksaan kemudian ada salah saji meskipun tidak material maka tetap kita lakukan teguran, rekomendasi untuk diperbaiki dan kalau seumpunya dia bersifat material kita mengembalikan ke kas daerah. Teguran itu ditujukan agar ke depannya pencatatan dapat dilakukan lebih teliti lagi.”

Oleh Ibu Husmawati yang menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi akan

ditelusuri terlebih dahulu penyebabnya sebelum melakukan perbaikan.

“Pada saat dilakukan pemeriksaan kita terlebih dahulu harus melihat penyebabnya apa, kenapa hal ini bisa terjadi dan kemudian kita berikan teguran dan juga rekomendasi untuk diperbaiki dan untuk pencatatannya kedepannya supaya lebih baik.”



Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketika para auditor inspektorat berhasil mendeteksi adanya temuan salah saji, maka akan ditelusuri terlebih dahulu musabab untuk mengetahui apakah kesalahan tersebut bersifat sengaja atau terjadi karena adanya *human error*. Penelusuran dilakukan tidak sebatas pada kesalahan yang material tetapi menyangkut semua kesalahan saji meskipun nilainya tidak material. Selanjutnya pihak inspektorat akan memberikan rekomendasi berupa perbaikan dengan tujuan agar laporan tersaji secara andal.

Komponen ke tiga adalah pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Setiap instansi harus membuat aktivitas pengendalian khusus berupa kebijakan dan prosedur untuk membantu manajemen dalam menjamin bahwa manajemen telah memberikan arahan yang tepat oleh karena itu, aktivitas pengendalian tertentu diarahkan untuk menghadapi resiko tertentu yang telah diidentifikasi selama penilaian resiko. Masalah yang timbul kemudian adalah, beberapa rekomendasi atau arahan tidak serta merta dapat diterima. Oleh karena itu pihak inspektorat sebisa mungkin melakukan konfirmasi mengenai penolakan rekomendasi yang diberikan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Husmawati yang menyatakan bahwa:

“Kami tetap melakukan penelusuran apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan bila diberi rekomendasi tidak diindahkan tetap kami konfirmasi ulang penyebab dan akibatnya seperti apa kedepannya supaya tidak terjadi lagi hal serupa.”

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Arnawanty bahwa penolakan rekomendasi adalah sebuah informasi yang tetap harus dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

“Kami disini memeriksa itu bukan hanya dalam kita mencari yang material tapi semua, segala aspek kita periksa mulai dari aparturnya yang tidak disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau ada yang pada saat dilakukan pemeriksaan terus rekomendasi tidak diindahkan tetap kami masukkan sebagai informasi bahwa pernah ada kejadian begini dan begini kondisi yang ditemukan, jadi tetap akan menjadi temuan”.

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aktivitas pengendalian dilakukan guna menjamin bahwa rekomendasi yang diberikan diterima dengan baik. Meskipun beberapa rekomendasi hanya berujung pada penolakan, pihak inspektorat tetap akan melakukan konfirmasi untuk menelusuri alasan di balik tertolaknya rekomendasi tersebut dan akibat yang ditimbulkannya.

Komponen ke empat adalah informasi dan komunikasi, yaitu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga setiap pegawai dapat menggunakan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Disampaikan dalam wawancaranya oleh Ibu Arnawanty menyatakan bahwa:

“Informasi-informasi yang kami peroleh itu ditelusuri dulu sumbernya, kalau-kalau ada yang tidak valid, kita lakukan konfirmasi, kita kumpul, kita cek fisik kelapangan, komunikasikan ke pihak ke tiganya.”

Pernyataan oleh Ibu Husmawati berikut turut mendukung pernyataan Ibu Arnawanty.

“Sebagai auditor kita dituntut untuk lebih peka terhadap informasi. Prinsip kehati-hatian itu harus benar-benar tertanam dalam diri setiap auditor, biar informasi yang diterima tidak asal comot.”

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa informasi-informasi yang diterima oleh pihak Inspektorat harus disaring terlebih dahulu melalui proses konfirmasi dan pengecekan fisik untuk memperoleh kevalidan atas data. Sebagai internal audit memang sepatutnya melakukan penelusuran tentang informasi yang ada agar informasi yang disajikan dapat lebih terjamin keandalannya.

Kemudian yang terakhir adalah pengawasan yaitu proses penilaian mutu kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu yang bertujuan untuk menilai kualitas dari sistem pengendalian internal setiap saat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang terus menerus secara terpisah maupun gabungan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Arnawanty bahwa:

“Kita lakukan lagi monitoring dari hasil temuan karena akan diekspos bahwa sekian temuan administrasi, sekian temuan keuangan dan sekian telah ditindak lanjuti kan itu menjadi penilaian BPK juga.”

Sejalan dengan hal yang dikatakan dengan ibu Husmawati yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan tetap kami lakukan karena kami di sini sebagai pemeriksa dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk bagaimana kedepannya lebih baiknya”.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa tetap dilakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap kinerja dari berbagai dinas karena selain pemeriksa inspektorat juga memberikan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah,

Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pujiwara dkk (2014) yang menyatakan bahwa melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Auditor internal yang melakukan pemeriksaan bisa saja melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh diri sendiri berupa kekhilafan atau kesengajaan atau dengan adanya iming-iming dari pihak luar seperti klien ataupun atasan. Akan tetapi, dengan melihat tugas dan tanggungjawab mereka sebagai internal audit pemerintah yang cukup berat memang diperlukan tameng dalam diri agar tidak tergoda oleh iming-iming dan terbebani oleh atasan sehingga dapat menjaga agar tidak kecolongan. Bukti yang cukup menandakan internal audit pemerintah kota Makassar menjalankan tugasnya dengan baik salah satunya mengevaluasi pengendalian internal yakni meraih penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan pemerintah kota Makassar tiga kali berturut-turut. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan Tuanakotta (2015: 93) menyatakan bahwa pengendalian internal dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani dan Rindah (2011) yang menunjukkan bahwa SPI mempunyai peran dan fungsi yang signifikan dalam

meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. Parasayu dan Abdul (2014) menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal dan integritas berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Sari (2016) menemukan bahwa pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur Inspektorat Kota Palu. Mahmudah dan Riyanto (2016) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap keefektifan internal audit. Rubniah dkk (2017) menemukan bahwa struktur audit, pengalaman dan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor internal. Setiawan dan Murya (2018) menunjukkan bahwa peran auditor internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

## **2. *Muhasabah Auditor Internal dalam mencegah Salah Saji Material***

Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Kecurangan mengacu pada kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan dengan tujuan tertentu sedangkan kekeliruan adalah tindakan yang tidak disengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar akuntansi.

Di sisi keagamaan, dalam beberapa ayat dan hadist menjelaskan bagaimana cara agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhana Wa ta'ala,

bagaimana kita menerima informasi, menjalankan sebuah amanah dan selalu melakukan evaluasi diri. Salah satunya yaitu konsep amar makruf nahi munkar juga dijelaskan dalam Q.S al-Imran/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

*“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S. al-Imran/ 3: 104).

Ayat tersebut menjelaskan konsep dimana perintah untuk menjalankan apa yang di perintahkan yaitu kebaikan dan apa yang dilarang yaitu kejahatan tentunya semua yang sifatnya menjadi perintah harus kita lakukan dan apa itu yang dilarang harus kita cegah (Suryanto dan Anip, 2016: 83). Semua konsep yang ada didunia ini pada prinsipnya sudah ada dalam al-Quran dan Sunnah sehingga memiliki alasan yang jelas mengapa harus dicegah karna pasti akan berakibat negatif untuk kehidupan manusia.

Selain ayat diatas, hal yang bisa kita lakukan agar mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar yakni meneladani 4 sifat Rasulullah yaitu Shiddiq, amanah, tablig dan dan fathonah (Sakdiah, 2016). Shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, sedangkan tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana (Zahroh dan Muhammad, 2015).

Dalam penelitian ini pemaparan oleh para informan menyiratkan bahwa para auditor meneladani sifat Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor internal, hal ini disampaikan oleh ibu Arnawanty bahwa:

“Alhamdulillah kalau kita disini tidak ada yang seperti itu karena sudah dari awal kita dikader supaya tidak mau terpengaruh suap dan sebagainya. Alhamdulillah juga memang kita di sini jalankan terus sholat bersama jadi masing-masing dilandasi iman yang kuat. Mungkin dulu pernah ada ucapan terima kasih tapi mulai tahun 2007 sudah tidak ada lagi karena sudah dikader, dan juga disini ada namanya UPG (Unit Pengendali Gratifikasi). Jadi kita melapor seandainya ada hal-hal semacam itu, baik itu dalam bentuk makanan maupun bentuk lainnya sebagai antisipasi. Di samping imannya memang Alhamdulillah teman-teman itu kuat tidak terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Kita juga pasti selalu melakukan evaluasi diri untuk bagaimana ke depannya bisa jadi lebih baik.”

Hal serupa dipaparkan oleh Ibu Husmawati bahwa:

“Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak terpengaruh dengan yang begitu-begitu seperti ucapan-ucapan terima kasih karena kami sadar memang kalau salah kenapa mesti dibenarkan apa lagi dengan bantuan suap-suap. Selalu kami evaluasi diri di mana terdapat kesalahan sebelumnya, maka ke depannya harus dihilangkan. Saya rasa semua tahu bagaimana terkenalnya kinerja dari Inspektorat kota Makassar ini yang anti seperti itu.”

Berdasarkan pemaparan oleh para informan dapat disimpulkan bahwa jujur dan terbuka adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh pihak inspektorat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menanamkan nilai kejujuran melalui kegiatan pengkaderan. Selain itu pihak inspektorat menghadirkan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai upaya untuk pencegahan adanya tindak suap atau hal serupa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Najm/ 53: 4-5.

*“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”.* [An-Najm/53: 4-5].

Sementara dalam segi pemeriksaan, pihak inspektorat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh yang tidak hanya menitikberatkan pada

pemeriksaan laporan keuangan tetapi menyangkut semua aspek material yang mempengaruhi kinerja. Seperti yang dijelaskan ibu Arnawanty bahwa:

“Tanggung jawab pemeriksaan kami itu tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi segala aspek kita periksa mulai dari aparaturnya yang tidak disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan.”

Pemaparan oleh Ibu Arnawanty tersebut menandakan bahwa pihak inspektorat berusaha menjalankan amanah dengan baik, sebab dalam melaksanakan tugas, semuanya dilakukan secara totalitas. Hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan materi. Oleh karena itu untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya auditor internal juga diberikan fasilitas-fasilitas berupa kendaraan dinas ataupun fasilitas lain seperti laptop. Dijelaskan oleh ibu Arnawanty bahwa:

“Memang teman-teman kami berikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang mereka dalam melakukan tugasnya sebagai auditor internal, dan kami persilakan untuk dibawa pulang karena kita tahu mereka pasti bertanggungjawab dengan hal yang diamanahkan. Misalnya laptop, pekerjaan mereka bisa saja terhambat kalau setiap pulang harus pindahkan file terus dirumah pakai laptop sendiri begitu juga dengan kendaraan, akan tidak efektif dan efisien waktu yang dimiliki dan jelas itu memakan waktu. Intinya mereka harus bertanggungjawab dengan benda yang diamanahkan untuk dijaga begitupun dengan pekerjaan mereka, harus dikerjakan sesuai aturan yang ada.”

Hal senada juga disampaikan ibu Husmawati bahwa:

“Teman-teman kita berikan fasilitas itu untuk pekerjaan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dibawa pulang bisa, asal dijaga. Yang salah biasanya ada teman-teman yang diberikan fasilitas terus kemudian dia dipindah tempatkan tapi barangnya dibawa juga, kami tetap melakukan tindakan karena itu merupakan aset kantor.”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa auditor tidak hanya bertanggungjawab atas pekerjaan mereka tetapi sekaligus memikul amanah untuk



menjaga dengan baik fasilitas yang diberikan. Hal tersebut dilakukan agar tugas dan tanggung jawab para auditor dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga amanah yang diberikan dapat dijaga dengan baik pula. Sebagaimana dalam Q.S. Al-A'raf/ 7: 68 sebagai berikut:

*“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.” [Al-A'raf/7: 68].*

Sementara dari segi tablig yaitu menyampaikan segala macam kebaikan.

Auditor internal memberikan informasi yang andal untuk menjamin keberlangsungan instansi yang diaudit. Seperti yang disampaikan ibu Arnawanty bahwa:

“Kita semua sangat tahu kan kalau laporan keuangan itu sangat penting bagi instansi. Tentu saja kita selaku pemeriksa harus menyiapkan informasi yang dapat diandalkan. Kita ungkapkan apa adanya, bukan malah membenarkan yang salah. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut masalah pengambilan keputusan.”  
Pendapat ini selaras dengan pendapat ibu Husmawati yang menyatakan

bahwa:

“Bisa dibilang kalau laporan keuangan itu merangkum separuh hidup instansi. Kalau laporannya saja sudah kacau, tidak andal, bagaimana instansi dapat bertahan kan? Untuk itulah kita sebisa mungkin memeriksa dengan teliti, supaya informasi yang disampaikan dapat membantu. Kalau ternyata terdapat hal yang tidak sesuai, kita beri masukan supaya diperbaiki.”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa auditor internal memberikan informasi untuk menjaga kebaikan instansi yang diaudit. Dalam hal ini pihak Inspektorat mengungkapkan informasi apa adanya sesuai dengan yang terjadi. Jika kemungkinan ditemukan adanya kesalahan, maka pihak yang terlibat akan mendapat informasi dari Inspektorat untuk dilakukan perbaikan. Dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Jin/ 72 :28 tersirat bahwa Rasulullah telah menyampaikan

risalah dari Allah SWT, dan sesungguhnya apa yang datang dari Allah adalah tidak lain merupakan sebuah kebajikan.

*“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” [Al-Jin/ 72: 28].*

Kemudian fathonah berarti cerdas dan bijaksana. Tanggung jawab sebagai auditor internal merupakan sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Individu yang terlibat paling tidak harus memiliki kecerdasan intelektual untuk mampu melaksanakan tugas dengan efektif. Oleh karena itu para calon auditor harus melalui proses rekrutmen yang memadai. Hal ini ditujukan agar pihak-pihak yang terlibat menangani masalah pemeriksaan dapat menghasilkan pekerjaan yang andal. Seperti halnya orang-orang yang tergabung dalam Inspektorat Kota Makassar adalah mereka yang telah melalui proses yang komplit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Arnawanty bahwa:

“Disini kami melakukan perekrutan ada dua jalur yaitu formasinya memang sebagai auditor yaitu lewat CPNS dan ada juga *impassing* yaitu selain CPNS, jadi kalau ada yang mau jadi auditor tapi bukan basicnya ya bisa dengan cara kami ikutkan pelatihan dan kalau sudah jadi masuk di sini tetap kami lakukan lagi pengkaderan untuk ditempa agar dalam melakukan pekerjaannya, bisa bertanggungjawab dan jelas berkompeten.”

Sejalan dengan yang dipaparkan Ibu Husnamawati bahwa:

“Teman-teman di sini sebelum mereka masuk mereka itu sudah diikutkan pelatihan, terus masuk ke sini ada lagi tahapannya seperti pengkaderan supaya dalam melaksanakan tugasnya teman-teman bisa berkompeten dan bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi.”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum menjadi auditor, para calon auditor harus diseleksi terlebih dahulu kompetensinya untuk dapat tergabung dalam ranah Inspektorat. Kemudian tetap melakukan pelatihan untuk

meng-update kemampuan yang dimiliki, sehingga dengan kompetensi tersebut dapat memberikan rekomendasi yang baik untuk auditeenya.

Adanya sifat Rasulullah yang diteladani oleh para auditor internal Inspektorat Kota Makassar membuat mereka dalam melaksanakan tugasnya selalu senantiasa mengingat kepada Allah. Sementara ketika terjadi kesalahan dalam melaksanakan mereka selalu mengevaluasi diri agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah. Sebagaimana dalam penjelasan Q.S. al-Hasyr/59: 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr/59: 18).*

Ayat diatas adalah menyiratkan perintah untuk senantiasa mengevaluasi (muhasabah) diri dan membuat perencanaan yang baik untuk masa mendatang. Adalah sebuah kewajaran jika manusia berbuat salah, namun akan sangat merugikan ketika kesalahan tersebut tidak disadari dan tidak pula diperbaiki. Oleh karena itu muhasabah sangat berperan penting dalam mengendalikan keinginan manusia yang tidak terbatas, tanpa ada muhasabah manusia bisa saja terlena dan lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya. Apalagi ketika keinginan-keinginan itu sudah terkontaminasi unsur hedonis, dimana kepuasan, kesenangan dan keberhasilan hidup hanya diukur dari kaca mata materialistik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliana (2013) yang mengatakan bahwa muhasabah

merupakan titik acuan untuk melakukan instropeksi diri bagi bank syariah untuk kembali kejalan yang benar.

Dikaitankan dengan teori atribusi, bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Auditor internal yang melakukan pemeriksaan bisa saja melakukan kesalahan yang diakibatkan oleh diri sendiri berupa kekhilafan maupun kesengajaan atau dengan adanya iming-iming dari pihak luar seperti klien ataupun atasan. Akan tetapi, dengan membudayakan muhasabah sekaligus mengaplikasikan sifat Rasulullah, maka kemungkinan untuk terjerumus ke dalam liang kesalahan menjadi lebih kecil. Sebab tujuan dari dilaksanakannya tugas bukan hanya bermuara pada kepuasan materi, tetapi juga untuk tujuan yang bersifat imateri. Penghargaan piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan pemerintah kota Makassar selama tiga kali berturut-turut, adalah bukti nyata bahwa pihak Inspektorat Kota Makassar betul-betul melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Dalam ruang lingkup instansi, cara yang dilakukan internal audit dalam mencegah salah saji material yaitu dengan melakukan pengendalian internal yang baik dan pembinaan serta pengawasan kepada instansi yang diaudit. Selain itu juga melakukan tugasnya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi diri atau muhasabah merupakan salah cara yang dilakukan auditor internal Inspektorat kota Makassar untuk mencegah salah saji material berdasarkan perpektif islam, dibuktikan dengan Surah Al-Hasyr Ayat 18 yang menganjurkan untuk selalu mengintropeksi diri untuk hidup yang lebih baik kedepannya. Selain itu teladan sifat Rasulullah juga dilakukan yaitu shiddiq berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan dan fathonah berarti cerdas dan bijaksana. Sehingga membuat auditor internal enggan untuk berbuat curang dengan mempertimbangkan sanksi dunia maupun akhirat.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka implikasi yang diajukan peneliti berupa:

1. Setiap manusia sekiranya melakukan tugas yang diamanahkan dengan selalu bermuhasabah.
2. Meningkatkan pencegahan kesalahan dan kecurangan dengan peningkatan pengendalian internal.
3. Menjaga nama baik auditor dan instansi karena menjalankan tugas berlandaskan peraturan instansi dan selalu mengevaluasi diri.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk diperbaiki di masa mendatang, antara lain:

1. Auditor inspektorat diharapkan dapat tetap melaksanakan tugasnya sebagai *internal audit* yang melakukan pemeriksaan, pengawasan sekaligus pembinaan agar dapat memberikan pencegahan dini terhadap hal-hal yang salah.
2. Auditor inspektorat diharapkan dapat tetap menjaga tingkat keimanan masing-masing agar terhindar dari praktik-praktik suap.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui muhasabah upaya *internal audit* dalam pencegahan salah saji material atas laporan keuangan. Sehingga, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti hal-hal lain yang dapat mencegah salah saji material dan meneliti auditor eksternal (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Moh. Risqi Kurnia, Komala Ardiyani, dan Arum Ardianingsih. 2016. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (*Fraud*) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10: 1-10.
- Afni, Zalida., Fera Sriyunianti dan Afridian Wirahadi Ahmad. 2012. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan: Studi pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 7(2): 69-77.
- Ariyantini, Kadek Evi., Edy Sujana dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *E- Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1): 1-10.
- Artini, Ni Luh Eka Ari, Made Pradana Adiputra, dan Nyoman Trisna Herawati. 2014. Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1):1-12.
- Dewi, Putu Feny Kharisma, Gede Adi Yuniarta, dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Internal Kas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi pada Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-12.
- Erfiansyah, Erfan., dan Ia Kurnia. 2018. Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung, Kabupaten. Bandung, dan Kabupaten. Bandung Barat). *J U R N A L I L M I A H M A N A J E M E N E K O N O M I D A N A K U N T A N S I*, 2(1): 144-160.
- Festi, Theresa.T., Andreas., dan Riska Natariasari. 2014. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perbankan Di Pekanbaru). *JOM FEKON*, 1(2): 1-16.
- Hall, James A. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/28/makassar-raih-opini-wtp-tiga-kali-berturut-turut-dari-bpk> akses 06 November 2018 19:57.
- Inspektorat Daerah Kota Makassar. *Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar*. Makasaar: Inspektorat Daerah Kota Makassar, 2017.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat: Jakarta.

- Mahmudah, H., Dan Riyanto, B. 2016. Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 33 - 51.
- Mindarti, Ceacilia Sri., Pancawati Hardiningsih., dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2016. Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit. *Simposium Nasional Akuntansi XIX* : 1-25
- Mulia, M. Harry Krishna, Rahmat Febrianto, dan Rayna Kartika. 2017. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2): 198-208.
- Mulyani, Pujianik, dan Rindah F. Suryawati. 2011. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No. 60 Tahun 2008) dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2):102-116.
- Novriani, Eliza., Unti Ludigdo., dan Zaki Baridwan. 2015. Studi Fenomenologi Atas Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 19(2): 217-240.
- Nurhayati. 2015. Melukis Akuntansi dengan Kuas Interpretif. *BISNIS*, 3 (1): 175-191.
- Parasayu, Annisa., dan Abdul Rohman. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Persepsi Aparat Intern Pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2): 1-10.
- Pearson, D. 2014. Significant Reforms In Public Sector Audit – Staying Relevant In Times Of Change And Challenge. *Journal Of Accounting & Organizational Change*, 10(1): 150-161.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Ramhat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Makassar.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Makassar.
- Pujiswara, Ida Bagus, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1):1-12.
- Rahmawati, Setya A. 2013. Telaah Ulang Makna Informasi Akuntansi dari Perspektif Pialang Saham. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3): 330-349.
- Ruhbaniah., Agusdin., dan Alamsyah. 2017. Determinan Kinerja Auditor Internal pada Inspektorat Se-Pulau Lombok. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(1), 66 - 84.



- Sakdiah. 2016. Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis ) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*, 22(33): 29-49.
- Sari, Ni Luh Putu Purnama, Gede Adi Yuniarta, dan I Made Pradana Adiputra. 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan *Fraud* (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupaten Tabanan). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1):1-11.
- Sari, Frisusmita. 2016. Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. *E Jurnal Katalogis*, 4(3): 94-106.
- Setiawan, Doddy., dan Murya Arief Basuki. 2018. Peran Auditor Intern Pemerintah, Motivasi, dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Akuntansi*, 22(1): 86-104.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Tulus, dan Anip Dwisaputro. 2016. *Konsep Pencegahan Kecurangan (Fraud) Akuntansi dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2015. *Audit Kontemporer*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliana, Rita. 2013. Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam (I M A N E N S I)*, 1(1): 1-74.
- Zahroh, Fathimatuz., dan Muhammad Nafik H.R. 2015. Nilai Fathonah dalam Pengelolaan Bisnis Di Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo). *Jestt*, 2(9): 745-758.

L

A

M

P

I

R

A

N



## HASIL WAWANCARA

**INFORMAN : Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA**

**WAKTU WAWANCARA 15 OKTOBER 2018**

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai salah saji material ?

Jawab: *Saji material yah, disini mi perannya kita bagaimana SPInya didalam, internalnya didalam. Jadi ada namanya SPI dan dia berjenjang reviewnya sehingga dimungkinkan untuk tidak terjadi salah saji karena dengan ada kejadian salah saji itu akan sangat berpengaruh sekali dengan laporan keuangan. Namun selama ini, kalau di inspektorat dalam laporan keuangan selama ini kayaknya belum ada kejadian salah saji tapi itu dalam pemerintahan pasti ada akan terjadi jadi kita bagaimana caranya untuk mencegah itu kita membuat SOP didalamnya itu mencakup SPInya, bagaimana kita mengendalikan mulai dari ee pertama pembukuannya, jurnalnya, buku besarnya apakah ini sudah cocok pos-posnya.*

2. Bagaimana cara pimpinan menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif pada instansi pemerintahan ?

Jawab: *Kami disini itu memiliki bagian-bagian dan dikepalai oleh inspektur dan dalam melaksanakan penugasan atau pemeriksaan itu ada penanggungjawabnya selaku inspektur disini ada wakil penanggungjawab yaitu yang madya atau inspektur pembantu. Kemudian ada ketua tim dibawahnya ada anggota tim jadi reviewnya itu mulai dari hasil anggota kemudian*

*direview oleh ketua tim dan selanjutnya direview lagi oleh wakil penganggungjawab atau pengendali teknis sehingga semuanya memiliki hubungan yang berkaitan.*

3. Apabila ditemukan hal-hal atau resiko-resiko yang mengancam tujuan instansi pembuat laporan keuangan, bagaimana cara menanggulangnya ?

*Jawab: Kalau pada saat dilaksanakan pemeriksaan kemudian ada salah saji maka tetap kita lakukan teguran, rekomendasi... kita memberikan rekomendasi untuk diperbaiki dan kalau seumpunya dia bersifat material kita mengembalikan ke kas daerah dan kalau tidak material tetap, tetap harus karena itu untuk bagaimana dalam pencatatannya kedepan.*

4. Aktivitas pengendalian seperti apa yang dilakukan, apabila rekomendasi atas salah saji material tidak direalisasikan ?

*Jawab: Kami disini memeriksa itu bukan hanya dalam kita mencari yang material tapi semua, segala aspek kita periksa mulai dari aparaturnya yang tidak disiplin, administrasi keuangan sampai dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau ada yang pada saat dilakukan pemeriksaan terus rekomendasi tidak diindahkan tetap kami masukkan sebagai informasi bahwa pernah ada kejadian begini dan begini kondisi yang ditemukan, jadi tetap akan menjadi temuan.*

5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya salah saji material ?

Jawab: *Tetap kita lakukan penelusuran, kalau bilang tidak valid kita tetap telusuri, kita lakukan konfirmasi, kita kumpul, kita cek fisik kelengkapan, pihak ke tiganya siapa.*

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya salah saji material ?

Jawab: *Tetap dilakukan monitoring, jadi kita lakukan lagi monitoring dari hasil temuan karena akan diekspos bahwa sekian temuan administrasi, sekian temuan keuangan dan sekian telah ditindak lanjuti kan itu menjadi penilaian BPK jugakan harus dilapor jadi tidak serta merta bahwa hilang begitu atau tidak tapi tetap bisa ditelusuri.*

7. Menurut anda seperti apa peran *internal control* menyikapi salah saji material ?

Jawab: *Semua harus ada pengendalian, masing-masing harus ada internal controlnya yang memang khusus menangani semua masalah. Jadi semakain bagus dan baik pengendalian internal atau internal control suatu instansi maka tidak ada kecurangan, tidak salah saji, dan bisa menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan.*

8. Dalam melakukan pemeriksaan apakah ada semacam kebijakan atau toleransi-toleransi diberikan atau jika ada kesalahan sedikit harus di salahkan ?

Jawab: *Kita melakukan itu sesuai dengan aturan, kalau memang ada kebijakan biasa diberikan kalau biasa temuan administrasi. Diberikan memang karena*

*dia tidak tau administrasi yang dilakukan dan masih bisa ditolerir dan diperbaiki saat itu. Kalau dia sudah material itu kita tetap melakukan pengembalian dan tetap kordinasi dengan BPK.*

9. Bagaimana bentuk muhasabah diri dari informan jika telah melakukan tindakan kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan?

*Jawab: Alhamdulillah kalau kita disini tidak ada seperti itu karena sudah dari awal kita sudah ada dikader, ada pengkaderan supaya tidak mau terpengaruh apa suap dll. Alhamddulillah juga memang kita disini jalankan terus sholat bersama jadi masing-masing dilandasi iman yang kuat. Mungkin dulu pernah ada didengar ada ucapan terima kasih tapi sesudah itu mulai tahun 2007 sudah tidak ada karena sudah dikader dan juga disini ada namanya UPG (unit pengendali gratifikasi) jadi kita melapor baik itu dalam bentuk makanan harus dilapor jadi kita disini sudah ada antisipasi itu disamping imannya memang Alhamdulillah teman-teman itu kuat nda terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Kita juga pasti selalu melakukan evaluasi diri untuk bagaimana kedepannya jadi lebih baik.*

10. Bagaimana dengan teman-teman yang diberikan fasilitas dan kemudian dibawa pulang ? Bagaimana jika fasilitas tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan tapi untuk kepentingan pribadi ?

*Jawab: Memang teman-teman kami berikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang mereka dalam melakukan tugasnya sebagai auditor internal, dan kami persilahkan untuk dibawa pulang karena kita tau mereka pasti bertanggungjawab dengan hal yang diamanahkan. Misalnya laptop, pekerjaan*

*mereka bisa saja terhambat kalau setiap pulang harus pindahkan file terus dirumah pakai laptop sendiri begitu juga dengan kendaraan, akan tidak efektif dan efisien waktu yang dimiliki dan jelas itu memakan waktu. Intinya mereka harus bertanggungjawab dengan benda yang diamanahkan untuk dijaga begitupun dengan pekerjaan mereka, harus diekerjakan sesuai aturan yang ada.*

11. Seperti apa bentuk perekrutan auditor disini ?

*Jawab: Disini kami melakukan perekrutan ada dua jalur yaitu formasinya memang sebagai auditor yaitu lewat CPNS dan ada juga impassing yaitu selain CPNS, jadi kalau ada yang mau jadi auditor tapi bukan basicnya ya bisa dengan cara kami ikutkan pelatihan dan kalau sudah jadi masuk disini tetap kami lakukan lagi pengkaderan untuk ditempa agar dalam melakukan pekerjaannya bisa bertanggungjawab dan jelas berkompeten.*

## HASIL WAWANCARA

**INFORMAN : Husmawati, S.E**

**WAKTU WAWANCARA 15 OKTOBER 2018**

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai salah saji material ?

Jawab: *Kalau di inspektorat dalam laporan keuangan selama ini kayaknya belum ada kejadian salah saji tapi itu dalam pemerintahan pasti ada entah itu administrasi atau keuangan.*

2. Bagaimana cara pimpinan menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif pada instansi pemerintahan ?

Jawab: *Disini kami berjenjang tingkatannya dan dikepalai oleh inspektur, adapun dalam penugasan tetap hasil kerja anggota tidak serta merta diberikan kepada atasan tapi melalui ketua tim kemudian inspektur pembantu sehingga dalam melaksanakan tugas anggota bisa merasa sadar akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan.*

3. Apabila ditemukan hal-hal atau resiko-resiko yang mengancam tujuan instansi pembuat laporan keuangan, bagaimana cara menanggulangnya ?

Jawab: *Pada saat dilakukan pemeriksaan kita terlebih dahulu harus melihat penyebabnya apa, kenapa hal ini bisa terjadi dan kemudian kita berikan teguran dadn juga rekomendasi untuk diperbaiki dan untuk pencatatannya kedepannya supaya lebih baik.*



4. Aktivitas pengendalian seperti apa yang dilakukan, apabila rekomendasi atas salah saji material tidak direalisasikan ?

Jawab: *Kami tetap melakukan penelusuran apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan bila diberi rekomendasi tidak diindahkan tetap kami konfirmasi ulang penyebab dan akibatnya seperti apa kedepannya agar supaya tidak terjadi lagi kedepannya.*

5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya salah saji material ?

Jawab: *Pengawasan tetap kami lakukan karena kami disini sebagai pemeriksa dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk bagaimana kedepannya lebih baiknya.*

6. Menurut anda seperti apa peran *internal control* menyikapi salah saji material ?

Jawab: *Kita disini selaku pemeriksa sekaligus mengayomi jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak maka harus dikembalikan untuk diperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi semakin bagus internal controlnya yaa jelas bisa mencegah salah saji maupun kecurangan.*

7. Dalam melakukan pemeriksaan apakah ada semacam kebijakan atau toleransi-toleransi diberikan atau jika ada kesalahan sedikit harus di salahkan ?

Jawab: *Kebijakan diberikan kalau memang dia tidak tau administrasi dan walaupun ada salah saji nominal tetap harus sesuai aturan yang ada, SOP yang ada.*

8. Bagaimana bentuk muhasabah diri dari informan jika telah melakukan tindakan kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan?

Jawab: *Alhamdulillah kalau saya pribadi tidak terpengaruh dengan yang begitu-begitu seperti ucapan-ucapan terima kasih karena kami sadar memang kalau salah kenapa mesti dibenarkan apa lagi dengan bantuan suap-suap dan selalu kami evaluasi diri dimana terdapat kesalahan sebelumnya maka kedepannya harus dihilangkan. Saya rasa semua tau bagaimana terkenalnya kinerja dari Inspektorat kota Makassar ini yang anti seperti itu.*

9. Bagaimana dengan teman-teman yang diberikan fasilitas dan kemudian dibawa pulang ? Bagaimana jika fasilitas tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan tapi untuk kepentingan pribadi ?

Jawab: *Teman-teman kita berikan fasilitas itu untuk pekerjaan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau dibawa pulang bisa asal dijaga dan juga dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang salah biasanya ada teman-teman yang diberikan fasilitas terus kemudian dia dipindah tempatkan tapi barangnya dibawa juga, kami tetap melakukan tindakan karena itu merupakan aset kantor.*

10. Seperti apa bentuk perekrutan auditor disini ?

Jawab: *Teman-teman disini sebelum mereka itu sudah diikutkan pelatihan terus masuk kesini ada lagi tahapannya seperti pengkaderan supaya dalam melaksanakan tugasnya teman-teman bisa berkompeten dan bertanggungjawab dalam memberikan rekomendasi.*

## DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Arnawanty, S.E., M.M.,Ak., CA



Wawancara dengan Ibu Husmawati, S.E

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 390A Tahun 2018

T E N T A N G

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN  
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Syahrul Ramadhan Nim: 90400114054 tertanggal untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Muhasabah upaya Internal Control dalam pencegahan salahsaji material atas Laporan Keuangan ( Studi pada pemerintah Kabupaten Luqwu Utara )
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Mustakim Muchlis, SE. M.Si., Ak.
2. Puspita Hardianti Anwar., SE, M. Si., Ak., CA., CP
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 21 Februari 2018

Dekan,   
PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1204 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Syahrul Ramadhan** : NIM: 90400114054
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
<b>Sekretaris</b>	: Drs. H. M. Ridwan, M.Si
<b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>	: Dr. Amiruddin K., M.El.
<b>Penguji Akuntansi Keuangan</b>	: Saiful, SE., M.SA., Ak.
<b>Penguji Auditing</b>	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
<b>Pelaksana</b>	: Fachrunnisa Thamrin, SE.
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 16 Agustus 2018



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1878 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Syahrul Ramadhan, NIM : 90400114054  
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Syahrul Ramadhan, NIM: 90400114054** untuk melaksanakan seminar hasil .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
**Sekretaris** : Jamaluddin M, SE.,M.Si.  
**Pembimbing** : Mustakim Muchlis, SE.,M.Si.,Ak.  
**Pembimbing II** : Puspita H. Anwar, SE, M.Si.,Ak.,CA.,CPA  
**Penguji I** : Dr. Lince Bulutoding, SE.,M.Si.,Ak  
**Penguji II** : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
**Pelaksana** : Kurniati Syukur, S.Ag.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 14 November 2018  
Dekan  
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIM 40581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ansp

Nomor : 6180 /EB.I/PP.00.9/9/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 18 September 2018

Kepada,

**Yth. UPT P2T BKPM**

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Syahrul Ramadhan**  
NIM : 90400114054  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Perum. Samata Indah

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

**“Muhasabah Upaya Internal Audit dalam Pencegahan Salah Saji Material atas Laporan Keuangan (Studi pada Inspektorat Kota Makassar)”**

Dengan Dosen pembimbing:

1. **Mustakim Muchlis, S.E., M.Si., Ak.**
2. **Puspita Hardianti Anwar, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Inspektorat Kota Makassar**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar,**



**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*





1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 6 5 4 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6526/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 6180/EB.I/PP.00.9/9/2018 tanggal 18 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SYAHRUL RAMADHAN**  
Nomor Pokok : 90400114054  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" MUHASABAH UPAYA INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN SALAH SAJI MATERIAL ATAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 September s/d 25 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 20 September 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 20-09-2018







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 25 September 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 4234 -II/BKBP/IX/2018  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA INSPEKTORAT  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6526/S.01/PTSP/2018 Tanggal 20 September 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

NAMA : SYAHRUL RAMADHANA  
NIM/ Jurusan : 90400114054 / Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UIN  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar  
Judul : "MUHASABAH UPAYA INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN SALAH SAJI MATERIAL ATAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak / Ibu , dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **25 September s/d 25 Oktober 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP**

Pangkat : Pembina

NIP 19621110 198603 1 042

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224  
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755  
E-mail: inspektorat\_makassar@yahoo.com



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

## SURAT KETERANGAN Nomor : 2992/Insp//070/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SYAHRUL RAMADHANA  
NIM / Jurusan : 90400114054/ Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Perguruan Tinggi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat dari Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Nomor : 070/4234-II/BKBP/IX/2018 tanggal 25 September 2018, dalam rangka Penelitian Skripsi dengan judul:

***“ MUHASABAH UPAYA INTERNAL AUDIT DALAM PENCEGAHAN SALAH SAJI MATERIAL ATAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR ”.***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Oktober 2018

an. INSPEKTUR  
Sekretaris,

**DAHYAL, S.Sos. M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19730905 199303 1 007

Tembusan :  
1. Arsip.



## RIWAYAT HIDUP



Syahrul Ramadhana lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Januari 1997. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Anak tunggal, putra pasangan Lukman dan Hj. Suhartina. Riwayat pendidikan dimulai pada tahun 2002 bersekolah di SDN 206 Ujung Baru dan SDN 185 Paomacang dan lulus pada tahun 2008, tahun 2011 lulus di SMP Negeri 2 Sukamaju, tahun 2014 lulus di SMA Negeri 2 Sukamaju, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar jurusan Akuntansi program studi strata 1 (S1). Selama kuliah pernah bergabung di Kandang Seni Tirai Bambu (KSTB) Akuntansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R